

**EVALUASI PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI
REKAPITULASI (SIREKAP) OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024**

(Skripsi)

Oleh

NICO ALIFIANSYAH

2116021041



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

“Evaluasi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2024”

Oleh

NICO ALIFIANSYAH

Penggunaan Sirekap pada pemilu 2024 di Kota Bandar Lampung mendapatkan berbagai kendala yang cukup serius. Pada penerapannya, proses unggah Sirekap Kota Bandar Lampung menjadi nomor tiga paling lambat dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Masalah lainnya yang terjadi di Kota Bandar Lampung yakni terkait penggelembungan suara yang terjadi saat pengoperasian sistem aplikasi Sirekap.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, serta dianalisis dengan teori komponen penerapan *e-government* Indrajit (2005) dan disesuaikan dengan kriteria evaluasi dampak kebijakan menurut Winarno (2002). Teori ini berfokus pada indikator *content development*, *competency building*, *connectivity*, *cyber security*, dan *citizen interface*. Penelitian ini dilaksanakan di KPU Kota Bandar Lampung, Bawaslu Kota Bandar Lampung, dan Partai Amanat Nasional Provinsi Lampung.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi pada SDM serta pembiayaan material pendukung Sirekap sangat penting dalam mendukung penerapan aplikasi Sirekap untuk berjalan secara maksimal. Namun pada faktanya, KPU Kota Bandar Lampung belum melakukan pengembangan kompetensi SDM secara menyeluruh dan melibatkan seluruh petugas yang menjalankan sistem, sehingga hal ini menyebabkan proses penerapan Sirekap dalam proses rekapitulasi berjalan dengan tidak maksimal. Dalam hal ini KPU Kota Bandar Lampung harus melakukan evaluasi guna melancarkan proses penerapan aplikasi Sirekap agar kedepannya tidak terjadi kendala yang sama.

Kata Kunci : Aplikasi, Evaluasi, KPU, Pemilu, Rekapitulasi, Sirekap

ABSTRACT

“Evaluation of the Implementation of the Recapitulation Information System (SIREKAP) Application by the Bandar Lampung City General Election Commission in 2024”

By

NICO ALIFIANSYAH

The use of Sirekap in the 2024 elections in Bandar Lampung City encountered several serious obstacles. In its implementation, Sirekap uploads in Bandar Lampung City were the third slowest out of 15 regencies/cities in Lampung Province. Another issue encountered in Bandar Lampung City was vote inflation that occurred during the operation of the Sirekap application system. This research used a qualitative research method with a case study design. Data were collected through in-depth interviews and documentation, and analyzed using Indrajit's (2005) theory of e-government implementation components and aligned with Winarno's (2002) policy impact evaluation criteria. This theory focuses on indicators of content development, competency building, connectivity, cyber laws, and citizen interface. This research was conducted at the Bandar Lampung City General Elections Commission (KPU), the Bandar Lampung City Elections Supervisory Agency (Bawaslu), and the National Mandate Party (PAN) in Lampung Province. This research demonstrates that human resource competency development and funding for supporting materials for Sirekap are crucial for optimal implementation. However, in reality, the Bandar Lampung City Election Commission (KPU) has not yet comprehensively developed human resource competencies and involved all officers operating the system, resulting in the suboptimal implementation of Sirekap in the recapitulation process. Therefore, the Bandar Lampung City KPU must conduct an evaluation to streamline the Sirekap application implementation and avoid similar problems in the future.

Keywords : Application, Evaluation, KPU, Election, Recapitulation, Sirekap

**EVALUASI PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI
REKAPITULASI (SIREKAP) OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024**

Oleh

NICO ALIFIANSYAH

2116021041

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi

**: EVALUASI PENERAPAN APLIKASI
SISTEM INFORMASI REKAPITULASI
(SIREKAP) OLEH KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2024**

Nama Mahasiswa

: Nico Alifiansyah

Nomor Pokok Mahasiswa : 2116021041

Program Studi

: S-1 Ilmu Pemerintahan

Jurusan

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Hertanto, M.Si.
NIP 196010101986031006

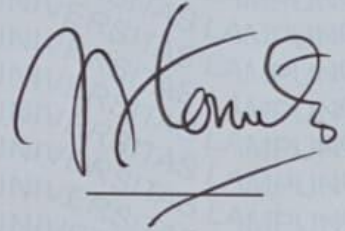
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si.
NIP 197106042003122001

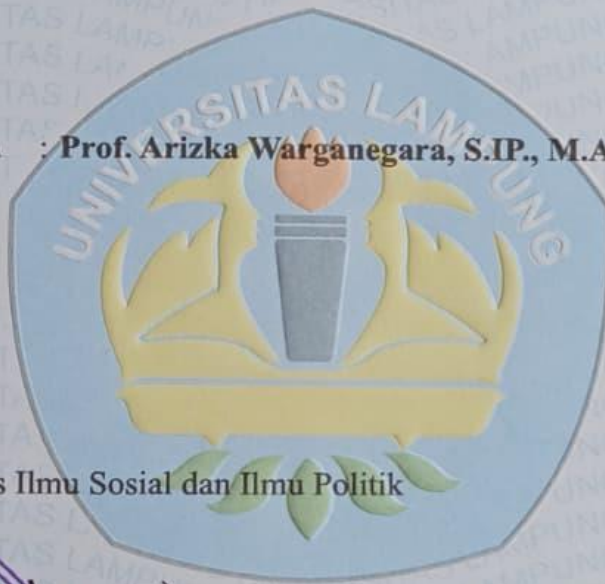
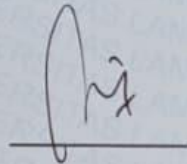
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Hertanto, M.Si.**



Penguji Utama : **Prof. Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **26 September 2025**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 31 Agustus 2025

embuat Pernyataan



Nico Alfiansyah
NPM 2116021041

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Nico Alifiansyah. Lahir di Tasikmalaya pada tanggal 11 Januari 2002. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Ahmad Hafani dan Ibu Tita Hayati. Penulis memulai pendidikan formalnya di Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Labuhan Dalam Kota Bandar Lampung pada tahun 2007 dan lulus di tahun 2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 20 Kota Bandar Lampung pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 13 Kota Bandar Lampung pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2021 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN dan dinyatakan lulus di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tahun ajaran 2021. Selama menjadi mahasiswa, peneliti aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi dan pengembangan diri. Peneliti aktif di organisasi kampus dan luar kampus, diantaranya adalah Panitia Khusus (PANSUS) sebagai anggota, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sebagai kepala Departemen Kewirausahaan dan Kepemudaan (KKP), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sosial Politik Unila sebagai anggota departemen Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi. Selain itu peneliti melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 38 hari di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Kemudian peneliti mengikuti program magang di Bawaslu Kota Bandar Lampung selama 6 bulan.

MOTTO HIDUP

“Dan apa saja kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu sendiri, niscaya kamu akan memperoleh (balasannya) di sisi Allah”
(QS. Al-Baqarah: 110)

Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda.
Cuma sekiranya kalau teman-teman merasa gagal dalam mencapai mimpi. Jangan khawatir karena mimpi-mimpi lain bisa diciptakan”
(Windah Basudara)

“Berdamai dengan apa yang terjadi, kunci dari semua masalah ini”
(Mangu-Cover Azizah)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala nikmat dan ridha-mu, sehingga pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat nantinya di masa depan dan dengan ketulusan dan kerendahan hati skripsi ini kupersembahkan kepada

Kedua orang tuaku Ayah dan Mama tercinta

Ahmad Hafani dan Tita Hayati

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang berkali-kali lipat dari Allah SWT

Almamater yang peneliti cintai dan banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Evaluasi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2024”**. Tak lupa shalawat serta salam tercurah tumpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kebanggaan bagi penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, diantaranya :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
3. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan

6. Ibu Dr. Tabah Maryanah selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
7. Bapak Prof. Dr. Hertanto, M.Si, selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan masukan berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan yang bapak berikan tidak hanya membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian secara akademis, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang ketelitian, kedisiplinan dan integritas dalam penulisan karya ilmiah. Semoga segala kebaikan, ilmu, dan waktu yang telah bapak curahkan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.
8. Bapak Prof. Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D, selaku Dosen Penguji Utama skripsi peneliti yang telah banyak memberikan saran, masukan dan pelajaran kepada peneliti dalam proses perbaikan skripsi agar menghasilkan skripsi yang lebih baik. Terimakasih atas ilmu yang telah bapak berikan, semoga bapak sehat selalu serta semoga seluruh kebaikan bapak menjadi pahala dan selalu dilindungi Allah SWT dalam setiap langkah dan perjalanan bapak.
9. Bapak Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si. selaku Pembimbing Akademik. Terimakasih atas bimbingannya selama ini, semoga bapak selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT
10. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih atas dedikasi yang telah engkau berikan kepada peneliti, sehingga peneliti bisa sampai ke posisi saat ini. Semoga bapak dan ibu selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT.
11. Teruntuk kedua orang tua tercinta yang paling berjasa dalam hidup saya, Ayah Ahmad Hafani dan Mama Tita Hayati, yang selalu memberikan doa dan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi, yang selalu menjadi penyemangat, serta tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang.

12. Teruntuk kucingku Oli sudah menemaniku selama mengerjakan skripsi sepanjang hari.
13. Untuk teman-teman Lambe Turah, Liza, Yuyun, Mulyo, Adit. Terima kasih sudah bersedia menjadi teman, sahabat, sekaligus keluarga baru penulis dari awal masa perkuliahan sampai dengan saat ini. Terima kasih atas semua dukungan, selalu berbagi cerita sedih ataupun senang, dan terima kasih atas semua kenangan indah yang sudah penulis dapatkan selama ini. Tanpa kalian mungkin penulis tidak akan memiliki banyak cerita baik selama menjadi mahasiswa Ilmu Pemerintahan.
14. Untuk sahabat terbaik Bisma, Mulyo, Adit. Terima Kasih atas semua cerita yang telah ditulis dalam hidup penulis. Terima kasih sudah bersedia menemani penulis dalam menyelesaikan masa perkuliahan. Semoga tali silaturahmi dan pertemanan kita selalu terhubung sampai anak cucu kita nanti.
15. Untuk Kabinet Muara Cita BEM FISIP Universitas Lampung, terima kasih sudah membantu penulis dan memberikan banyak pengalaman kepada penulis dalam proses pengembangan diri di BEM FISIP Universitas Lampung.
16. Untuk keluargaku HMI Komisariat Sosial Politik Unila, terima kasih kepada Kanda dan Yunda, serta seluruh kader yang telah berkenan menjadi wadah penulis untuk mengembangkan potensi diri dan kebersamaan penulis dari awal sampai dengan akhir masa perkuliahan. Semoga kita semua dapat mencapai semua yang kita impikan di masa depan.
17. Untuk teman magang MBKM Anggun, Dinda, Nita, Ayu, dan Wulan. Terima kasih telah kebersamaan peneliti dari awal magang dimana banyak cerita yang kita ukir saat melakukan magang MBKM. Semoga dimanapun kalian berada selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah SWT.
18. Kepada teman-teman “KKN Harapan Jaya, 2024.” Adi, Rasel, Anin, Bella, Mayang, Widi dan juga Pak Siun, Ibu Supiyah serta masyarakat Desa Harapan Jaya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.

19. Narasumber penelitian, terimakasih untuk semua narasumber yang telah memberikan informasi dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian kepada penulis.
20. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2021. Terima kasih sudah mengisi hari-hari penulis di kampus dan berproses bersama dari masa menjadi mahasiswa baru sampai dengan sekarang sama-sama memperjuangkan masa depan. Semoga nantinya kita dipertemukan lagi dititik tertinggi kita dengan mencapai seluruh impian kita.
21. Dan yang terakhir kepada diri saya sendiri, Nico Alifiansyah. Terima kasih tidak menyerah dalam memenuhi tanggung jawab sebagai mahasiswa. Terima kasih telah berjuang sampai detik ini.

Terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa penulis ucapkan satu per satu. Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi keberlangsungan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian khususnya di bidang politik dan juga pemerintahan kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 31 Agustus 2025
Peneliti

Nico Alifiansyah
NPM 2116021041

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
II. KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Definisi Konsep Evaluasi	14
2.1.1. Definisi Evaluasi	14
2.1.2. Tujuan Evaluasi.....	14
2.1.3. Jenis Evaluasi	15
2.1.4. Dimensi Evaluasi Kebijakan	15
2.1.5. Kriteria Evaluasi Dampak Kebijakan.....	16
2.2 Definisi <i>E-Government</i>	18
2.3 Definisi Aplikasi.....	20
2.4 Definisi Informasi.....	20
2.5 Kerangka Pikir.....	21
III. METODE PENELITIAN	24
3.1 Tipe Penelitian.....	24
3.2 Lokasi Penelitian	24
3.3 Fokus Penelitian	25

3.4 Informan Penelitian	26
3.5 Jenis Data.....	28
3.6 Sumber Data	29
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.8 Teknik Pengolahan Data.....	32
3.9 Teknik Analisis Data.....	33
3.10 Teknik Keabsahan Data.....	35
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum	36
4.1.1 Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum	37
4.1.2 Fungsi, Wewenang dan Tugas Komisi Pemilih Umum.....	39
4.2 Gambaran Umum Sirekap	46
4.2.1 Fungsi Sirekap.....	47
4.2.2 Jenis Sirekap.....	48
4.3 Hasil Penelitian.....	51
4.4 <i>Content Development</i>	56
4.4.1 Pengembangan Aplikasi	56
4.5 <i>Competency Building</i>	65
4.5.1 Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi SDM.....	65
4.6 <i>Connectivity</i>	74
4.6.1 Ketersediaan Infrastruktur Komunikasi dan Server Sirekap.....	75
4.6.2 <i>Gadget</i> dan Alat Pendukung Sirekap yang Tidak Memadai	81
4.7 <i>Cyber Security</i>	86
4.7.1 Keamanan dan Pembatasan Hak Akses Akun	86
4.8 <i>Citizen Interface</i>	92
4.8.1 Aksesibilitas Informasi Publik Sirekap	92
4.10 Analisis Secara Umum	100
4.11 Rekomendasi kebijakan sistem sirekap	106

V. SIMPULAN DAN SARAN.....	107
5.1 Simpulan.....	107
5.2 Saran atau Rekomendasi.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Jumlah petugas Pemilu yang tertimpa musibah pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Bandar Lampung	3
Tabel 2 Rekapitulasi Jumlah DPT Pemilihan Umum Tahun 2024.....	6
Tabel 3 Informan Penelitian	27
Tabel 4 Evaluasi Kendala Sirekap.....	65
Tabel 5 Identifikasi Masalah SDM	74
Tabel 6 Pelaksanaan kebijakan Sirekap oleh KPU Bandar Lampung	99
Tabel 7 Rekomendasi kebijakan aplikasi Sirekap	106

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Pikir.....	23
Gambar 2 Sirekap <i>Mobile</i>	49
Gambar 3 Sirekap <i>Website</i>	50
Gambar 4 Fitur Pemindaian Otomatis (OCR).....	57
Gambar 5 Fitur Koreksi Sirekap	58
Gambar 6 Fitur Penjaga Aritmatika	59
Gambar 7 Fitur Sirekap Mode <i>Offline</i>	60
Gambar 8 Bimtek Sirekap KPU Kota Bandar Lampung	66
Gambar 9 Simulasi Penggunaan Sirekap	67
Gambar 10 Bimtek Penggunaan Sirekap Kecamatan Way Halim	69
Gambar 11 Server Sirekap <i>down</i> di Kota Bandar Lampung.....	77
Gambar 12 Tampilan Sirekap <i>web</i> info pemilu.....	93

DAFTAR SINGKATAN

Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
DDOS	: <i>Distributed Denial Of Service</i>
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
ICT	: <i>Information and Communication Technology</i>
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
LINMAS	: Perlindungan Masyarakat
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pileg	: Pemilihan Legislatif
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Pilpres	: Pemilihan Presiden
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
SDM	: Sumber Daya Manusia
Sirekap	: Sistem Informasi Rekapitulasi
Situng	: Sistem Penghitungan
TPS	: Tempat Pemungutan Suara

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang melaksanakan pemilihan umum secara rutin sebagai bentuk partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat, sehingga setiap warga negara memiliki hak suara dalam setiap proses pemerintahan. Selain sebagai wujud dari pelaksanaan demokrasi, (pemilu) juga menjadi sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila. Kedaulatan rakyat sendiri menurut Keintjem (2023) berarti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang ingin dicapai melalui Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum di Indonesia sudah dilakukan beberapa kali, antara lain pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024. Pada tahun 2024 pemilihan umum berlangsung pada tanggal 14 Februari yang lalu sesuai dengan ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah dijadwalkan tahapan dan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dengan nomor aturan KPU 3 tahun 2022. Hal ini dipertegas juga oleh Keputusan Presiden RI nomor 10 tahun 2024 tentang hari pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024 sebagai hari libur nasional dan merupakan bentuk partisipasi politik. Hal ini menunjukkan bahwa negara menjalankan undang-undang dasar dalam membentuk pemerintahan yang demokrasi sesuai konstitusi yang telah disepakat.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, masyarakat dituntut untuk bisa menjadi pemilih yang bijak dalam menentukan kriteria seorang pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan. Pemilihan umum merupakan proses demokratis dimana semua warga negara memiliki hak politik yang sama untuk berpartisipasi secara langsung untuk memilih dan dipilih menjadi pemimpin. Ada beberapa jenis Pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Pada tahun 2019 Indonesia melakukan pemilu serentak yang pertama, dari tingkatan nasional, regional hingga tingkatan lokal. Adapun efek dari pemilu tersebut pemilih harus meluangkan waktu yang lebih lama dikarenakan terdapat lima surat suara yang harus mereka coblos, dari memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Selain pemilih yang harus meluangkan waktu yang cukup lama dampak yang terjadi pada petugas penyelenggara pemilu yaitu meningkatnya beban kerja bagi petugas hingga mengakibatkan korban jiwa yang berjatuhan. Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum sebanyak 894 anggota KPPS meninggal dunia dan 5.175 orang sakit dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019 (Sucahyo, 2020). Kondisi ini juga terjadi di wilayah Kota Bandar Lampung, banyak petugas yang sakit dan meninggal dunia karena beban kerja yang terlalu berat serta terpaut umur yang sudah cukup tua. Berikut adalah tabel yang menunjukkan petugas pemilu 2019 yang tertimpa musibah di Kota Bandar Lampung :

Tabel 1 Jumlah petugas Pemilu yang tertimpa musibah pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Bandar Lampung

No	Jenis Petugas Pemilu	Meninggal Dunia	Sakit
1	PPK	0	52
2	PPS	1	64
3	KPPS	13	117
4	LINMAS	4	8
5	Sekretariat (PPK/PPS/KPPS)	1	4
Jumlah		19	245

Sumber : Buku Dalam Angka 2019 KPU Provinsi Lampung

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa cukup banyak petugas pemilu yang tertimpa musibah akibat terlalu lelah ketika menjadi panitia pemilu tahun 2019. Maka dari itu dibutuhkan sebuah pemanfaatan teknologi informasi yang diharapkan bisa mengurangi beban kerja bagi petugas pemilu di masa pemilihan serentak tahun 2024.

KPU awalnya telah menciptakan sistem elektronik dan digital bernama Situng atau sistem penghitungan suara, proses perhitungan suara dan rekapitulasi hasil selama pemilu menggunakan sistem yang telah diterapkan sejak pemilu tahun 2014 dan tetap digunakan pada pemilu 2019. Prosedur dasar Situng dimulai dengan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh KPPS. Setelah itu, petugas KPPS melakukan rekapitulasi suara di TPS dan mencatat hasilnya dalam formulir C1, yang kemudian diserahkan secara bertahap ke KPU di tingkat kabupaten/kota melalui Panitia Pemungutan Suara di tingkat kelurahan dan Panitia Pemilihan Kecamatan di tingkat kecamatan. KPU Kabupaten/Kota memasukkan data C1 ke dalam sistem dan melakukan entri data. Hasil tersebut kemudian dipublikasikan, sehingga dapat diakses oleh masyarakat. Informasi yang tersedia dalam Situng mencakup hasil penghitungan cepat, rekapitulasi, penetapan suara, serta penetapan kursi dan calon terpilih. Pada pemilihan umum 2024, KPU tidak lagi menggunakan Situng, melainkan menggantinya dengan sistem

baru yang disebut dengan Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu atau Sirekap. Penghapusan istilah Situng dilakukan melalui rancangan revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2018 mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada.

Meskipun demikian, Sirekap memiliki kemiripan dengan Situng yang digunakan pada Pemilu 2019. Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu menjadi bagian dari instrumen pada pelaksanaan proses rekapitulasi suara mulai dari tingkat KPPS. Biasanya pada tahapan rekapitulasi menggunakan cukup banyak salinan kertas, dengan adanya Sirekap berpindah menjadi digital. Masyarakat dapat mengakses rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu 2024 melalui laman resmi *infopemilu.kpu.go.id*. Dalam penggunaannya, Sirekap mempunyai berbagai keunggulan yang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pada proses perhitungan dan pemungutan suara sehingga dapat mengurangi potensi konflik yang terjadi pada proses pemungutan suara secara manual serta data yang dihasilkan dalam bentuk digital dapat mempercepat proses analisis dan pelaporan yang juga dapat meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi mengenai transparansi pada proses pemilu (Saetrian et al., 2024).

KPU telah menciptakan dua varian Sirekap pemilu yang mudah diakses. Varian pertama dirancang untuk pengguna secara *mobile*, menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, sementara varian lainnya tersedia dalam bentuk *website*. Aplikasi Sirekap *Mobile* digunakan oleh KPPS untuk merekap hasil pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS). Fungsinya sebagai sumber data utama untuk perhitungan suara yang dicatat dalam Formulir C Hasil-Plano. Sementara itu, Sirekap versi *web* digunakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), anggota KPU di tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi, serta dapat diakses oleh seluruh elemen dan lapisan masyarakat dengan melalui laman *website* <https://pemilu2024.kpu.go.id/>. Sistem informasi rekapitulasi (Sirekap)

bertujuan untuk mengumpulkan data utama dari setiap TPS. Akun Sirekap diberikan tiga hari sebelum hari pemilihan dan terus diperbarui hingga menjelang pencoblosan.

Pesatnya perkembangan teknologi dan potensi pemanfaatannya yang luas, menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu, dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemilu sehingga menghasilkan proses dan hasil pemilu yang berkualitas serta berintegritas. Namun, penggunaan teknologi seperti Sirekap dapat mempermudah proses pemungutan suara dan penghitungan hasil pemilu, juga bisa membawa risiko yang cukup besar. Misalnya penggunaan teknologi canggih dalam proses tahapan rekapitulasi yang memakan waktu dan melibatkan pekerja dapat menjadi penyebab terjadinya manipulasi suara.

Penggunaan Sirekap pada pemilu 2024 bukannya tanpa ada masalah. Masalah seperti keamanan data suara juga menjadi faktor yang sangat krusial dan harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Problematika transparansi juga menjadi perhatian utama dalam Sirekap (Pradesa, 2024). Pada pemilu Indonesia 2024, penggunaan Sirekap sangat dipertanyakan, karena bermasalah dan berindikasi terjadinya penggelembungan suara yang memicu ketidakpercayaan publik kepada KPU. Bahkan dinilai sebagai dugaan kecurangan sistem pemilu yang menyebabkan timbulnya polemik terkait penggelembungan suara dalam Sirekap milik KPU. Fenomena tersebut menjadi salah satu kisruh pada perhitungan suara pemilu tahun 2024 di Indonesia. Kasus data penggelembungan suara Sirekap pada pemilu tahun 2024 sebanyak 154.541 dari total 823.220 TPS dengan perolehan suara pemilih presiden, 13.767 TPS, pemilihan legislatif DPR RI dan 16.540 TPS pemilihan legislatif DPD RI, telah terjadi penggelembungan suara pada sirekap di 16 Provinsi, 83 Kabupaten/Kota di Indonesia.

Tabel 2 Rekapitulasi Jumlah DPT Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Kedaton	7	143	19.875	20.177	40.052
2	Sukarame	9	179	23.545	24.064	47.609
3	Tanjung Karang Barat	7	163	21.697	21.862	43.559
4	Panjang	8	193	26.728	26.109	52.837
5	Tanjung Karang Timur	5	103	14.201	14.348	28.549
6	Tanjung Karang Pusat	7	139	18.618	18.379	36.997
7	Teluk Betung Selatan	6	109	14.962	14.595	29.557
8	Teluk Betung Barat	5	93	13.545	12.921	26.466
9	Teluk Betung Utara	6	133	18.500	18.697	37.197
10	Rajabasa	7	143	20.182	19.550	39.732
11	Tanjung Senang	5	160	22.424	22.887	45.311
12	Sukabumi	7	182	25.722	25.432	51.154
13	Kemiling	9	220	29.485	30.066	59.551
14	Labuhan Ratu	6	127	17.645	18.066	35.711
15	Way Halim	6	183	25.035	25.546	50.581
16	Langkapura	5	112	14.916	15.297	30.213
17	Enggal	6	72	9.468	10.085	19.553
18	Kedamaian	7	147	19.327	19.447	38.804
19	Teluk Betung Timur	6	127	17.560	16.982	34.542
20	Bumi Waras	5	152	21.602	20.548	42.150
TOTAL		126	2.880	395.037	395.088	790.125

Sumber : KPU Kota Bandar Lampung

Pemilu tahun 2024 yang diselenggarakan pada hari Rabu 14 Februari 2024 diikuti lebih dari 204 juta pemilih yang tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa dan melibatkan 18 partai politik serta 6 partai lokal Aceh. Hal ini tentunya semakin menegaskan

bahwasannya pemilu yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu pemilu terbesar di dunia, dengan melibatkan ratusan juta masyarakat, ribuan petugas penyelenggara, ribuan aparat keamanan serta ratusan ribu bahan logistik berupa kertas surat suara, bilik suara dan lain sebagainya. Tentunya pelaksanaan Pemilu ini bisa menimbulkan berbagai macam perpecahan yang diakibatkan oleh perbedaan pilihan, perbedaan pandangan politik serta tidak menutup kemungkinan pula kekisruhan akan timbul karena adanya ketidaksesuaian atau kecurangan yang ditimbulkan oleh oknum oknum tidak bertanggung jawab yang bisa merugikan pasangan calon lain.

Berdasarkan data rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bandar Lampung pada pemilu tahun 2024 di atas, daftar pemilih tetap yakni sebanyak 790.125 pemilih. Jumlah ini dibagi dalam 395.037 pemilih laki-laki dan 395.088 pemilih perempuan yang tersebar di 20 Kecamatan diseluruh Kota Bandar Lampung. Dari tabel tersebut Kecamatan Kemiling menjadi wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak. Jumlah DPT di Kecamatan Kemiling berjumlah 59.551 yang dimana terbagi dalam jumlah DPT laki-laki sebanyak 29.485 dan jumlah DPT perempuan sebesar 30.066 yang tersebar di 220 titik TPS dengan jumlah 9 Kelurahan. DPT ini akan menjadi dasar perhitungan jumlah surat suara dan logistik lain yang akan digunakan pada saat pencoblosan.

Penggunaan Sirekap pada pemilu 2024 di Provinsi Lampung mendapatkan berbagai kendala yang cukup serius. Fery Triatmojo selaku Ketua Divisi Teknis KPU Kota Bandar Lampung mengatakan progres upload sirekap Kota Bandar Lampung menjadi nomor tiga paling lambat dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Padahal Bandar Lampung merupakan Ibukota provinsi yang blank spotnya paling sedikit, diduga hal ini terjadi karena adanya serangan terhadap komputasi sirekap dalam bentuk *Distributed Denial of Service (DDoS)* yang membanjiri lalu lintas sumber daya daring dan menyebabkan layanan *web* gagal beroperasi

secara normal dan bahkan luring (Rmollampung, 2024). Masalah lainnya yang terjadi dalam sirekap pada saat pemilu terjadi di Kota Bandar Lampung yakni terkait penggelembungan suara, dimana pada TPS 14 Kemiling Raya terdapat 239 perolehan suara tiga paslon. Paslon 01 Anies-Muhaimin meraih 52 suara, Paslon 02 Prabowo-Gibran meraih 177 suara dan Paslon 03 Ganjar-Mahfud meraih 10 suara. Akan tetapi, perolehan suara Paslon 02 di *website* pemilu2024.kpu.go.id atau sirekap berjumlah 677, bukan 177 sehingga hal ini membuat kekisruhan terjadi di kalangan masyarakat (Rmollampung, 2024).

Aplikasi Sirekap yang digunakan oleh KPU dalam pemilu tahun 2024 telah menjadi sorotan publik terkait berbagai permasalahan yang telah terjadi. Dengan berbagai tantangan hingga kritik yang muncul terhadap KPU dari pengguna dan masyarakat membuat KPU harus melakukan evaluasi terkait aplikasi Sirekap ini. Aplikasi Sirekap ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan juga meningkatkan efisiensi, sekaligus meminimalkan terjadinya kecurangan pada proses manual (Pradesa, 2024).

Namun, terdapat salah satu kendala yang signifikan dihadapi ialah berasal dari permasalahan teknis dan aksesibilitas yang menjadi permasalahan pada pemilihan presiden 2024 lalu. Aspek transparansi dan kepercayaan publik menjadi isu penting dalam evaluasi Sirekap. Evaluasi yang seharusnya dilakukan adalah adanya upaya uji coba dan pengujian sistem secara transparan. Banyak masyarakat yang merasa kurang mendapatkan informasi yang jelas terhadap cara kerja Sirekap, sehingga hal ini berkontribusi pada kebingungan dan kecurigaan terhadap hasil pemilu.

Merespon permasalahan penggelembungan suara, pihak KPU sudah melakukan perbaikan dalam aplikasi Sirekap untuk menghadapi Pilkada 2024 salah satunya adalah akan adanya fitur validasi terlebih dahulu.

Peningkatan infrastruktur teknologi sangat perlu diperhatikan guna memastikan bahwa Sirekap dapat berfungsi dengan baik pada Pilkada 2024. Hal ini juga termasuk pada penyediaan jaringan internet yang stabil dan pelatihan intensif bagi petugas pemilu agar mereka dapat menggunakan Sirekap dengan efektif. Disisi lain, sistem dari aplikasi Sirekap dapat diperkuat dari segi keamanannya guna melindungi data dari ancaman siber. Kemudian, mengadakan uji coba secara menyeluruh sebelum pemilu berlangsung guna mengidentifikasi dan mengatasi adanya potensi masalah teknis. Dengan adanya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, Sirekap diharapkan bisa menjadi target capaian sebagai potensi besar dalam solusi modern guna meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses pemilu di masa yang akan datang.

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang selaras dengan topik dan permasalahan yang akan diteliti. Hal ini dilakukan guna membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, selain itu penelitian terdahulu diperlukan agar dapat menjadi acuan dalam proses penulisan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang penulis gunakan antara lain sebagai berikut.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Roma Indah Lingga, Iskandar Zulkarnain dan Indra Fauzan (2024) dengan judul “Penggunaan Teknologi Informasi Pada Proses Rekapitulasi dalam Perspektif Pemilu Transparan di Kabupaten Asahan”. Pada penelitian ini membahas penggunaan Sirekap sebagai alat publikasi dan rekapitulasi pada Pemilu 2024 untuk mendukung transparansi hasil Pemilu di Kabupaten Asahan. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana teknologi informasi dalam rekapitulasi oleh KPU dapat mendukung Pemilu transparan dan menganalisis International IDEA, penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data meliputi reduksi, penyajian, kondensasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa

teknologi informasi dalam rekapitulasi tidak sepenuhnya mendukung pemilu transparan di Asahan dan perlu di evaluasi lebih lanjut. Namun kepedulian masyarakat terhadap publikasi hasil suara meningkat. Penggunaan Sirekap membutuhkan perbaikan dalam hal Sumber Daya Manusia, jaringan/server, akurasi data, dan keutuhan informasi.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Azzahri (2024) yang berjudul “Tinjauan Kritis terhadap Penggunaan Aplikasi Sirekap dalam Proses Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur serta studi dokumen. Temuan dalam penelitian ini dibahas dengan teori efektivitas yang membahas tingkat keefektifan dan ketepatangunaan penggunaan sirekap pada pemilu. Studi literatur yang digunakan untuk mempelajari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi Sirekap, sementara studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Temuan dalam penelitian ini akan penulis bahas dengan teori efektivitas yang membahas mengenai tingkat keefektifan dan ketepatangunaan penggunaan aplikasi Sirekap dalam proses pemilu presiden 2024. Timbulnya ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pemilu yang dihitung melalui aplikasi Sirekap dan kurangnya kesiapan aplikasi serta pendukung penggunaan aplikasi membuat aplikasi Sirekap menjadi perhatian penulis untuk dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Nurhamiden (2024) dengan judul “Sirekap : Tantangan dan Potensi Kekeliruan Proses Rekapitulasi Pemilu Serentak di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana terdapat realitas sosial terhadap Sirekap sebagai kebijakan Pemilu 2024. Adapun pendekatan yang dilakukan ialah melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sirekap sebagai kebijakan pemilu 2024

ini mempunyai tantangan dan potensi kekeliruan dalam pelaksanaannya. Potensi tersebut terdiri atas: pertama, luasnya wilayah Indonesia dengan wilayah geografis yang berbeda-beda dan minimnya sarana pendukung akibat wilayah tersebut. Kedua, kemampuan SDM penyelenggara Pemilu yang tidak semuanya memahami Sirekap sebagai salah satu metode penghitungan suara pada Pemilu 2024 ini. sementara itu, potensi kekeliruan dalam penggunaan Sirekap dalam penghitungan suara Pemilu 2024 ialah: pertama, adanya serangan siber hingga kondisi yang *error* terhadap *website* yang digunakan oleh KPU menjadi rentan terjadi. kedua, kekeliruan penginputan data dalam akses Sirekap yang dilakukan oleh anggota KPPS menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari potensi penggunaan Sirekap dalam Pemilu 2024.

Penelitian keempat dilakukan oleh Pradesa (2024) yang berjudul “Analisis Penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) Dalam Menghadapi Problematika Pemilu 2024”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) dalam menghadapi problematika Pemilu 2024. Fokus penelitian mencakup efektivitas, keamanan, dan transparansi Sirekap dalam konteks pemilu yang semakin kompleks dan menuntut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, dan buku yang relevan dengan topik penelitian. Analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan temuan kunci yang muncul dari data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) dapat meningkatkan efisiensi pada proses penghitungan suara, mempercepat pengumuman hasil, dan meningkatkan akurasi proses pemilu. Namun, tantangan terkait dengan keamanan data, kurangnya transparansi, dan potensi ancaman terhadap integritas pemilu juga perlu diperhatikan dengan serius.

Penelitian kelima dilakukan oleh Lestari dan Utamajaya (2024) yang berjudul “Audit Sistem Informasi Aplikasi Sirekap KPU : Analisis Keamanan dan Efisiensi”. Penelitian ini menyelidiki latar belakang dan pentingnya sistem Sirekap dalam proses pemilu, dengan tujuan mengidentifikasi potensi kerentanan dan menilai kinerja sistem. Menggunakan kombinasi metodologi analisis risiko dan pengujian sistem, studi ini mengungkapkan beberapa kekuatan dan kelemahan dalam aplikasi tersebut. Temuan penelitian ini menyoroti perlunya perbaikan untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan dan efisiensi operasional aplikasi. Implikasi dari penelitian ini memberikan kerangka kerja untuk perbaikan di masa depan dan memastikan keandalan sistem dalam mendukung pemilu yang adil dan efektif.

Setelah melihat beberapa penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan pada penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya, yang pertama ditinjau dari segi teori, lokasi studi, karakteristik dan urgensi yang berbeda. Kedua, penelitian ini akan mengkaji dan mendeskripsikan bagaimana evaluasi yang dilakukan KPU Kota Bandar Lampung sebagai subjek yang membuat kebijakan terhadap penerapan aplikasi Sirekap kepada petugas KPPS pada pemilu tahun 2024. Dari uraian diatas permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) oleh KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2024”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dengan demikian rumusan masalah pada penelitian ini adalah “ Bagaimana evaluasi yang dilakukan KPU Kota Bandar Lampung terhadap aplikasi Sirekap selama tahun 2024 di Kota Bandar Lampung ? ”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis dampak evaluasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung terhadap penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) pasca pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan keilmuan terkait sistem teknologi dan informasi yang bisa berguna untuk pengaplikasian Sirekap serta menggambarkan proses evaluasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung terhadap aplikasi Sirekap selama Pemilihan Umum tahun 2024 dan bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat praktis. Pertama, hasilnya dapat menjadi gambaran bagi masyarakat umum tentang bagaimana Komisi Pemilihan Umum melakukan penyelesaian masalah dan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi Sirekap pada pemilihan umum tahun 2024. Kedua, Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi akademik kepada KPU Kota Bandar Lampung khususnya divisi perencanaan data dan informasi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada penggunaan Sirekap

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Definisi Konsep Evaluasi

2.1.1. Definisi Evaluasi

Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris yakni “*evaluation*” yang berarti penaksiran atau penilaian. Evaluasi dapat diartikan juga sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk membandingkan hasil dengan standar atau kriteria yang telah ditentukan, serta menyusun kesimpulan dan saran berdasarkan perbandingan tersebut. Evaluasi didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan menggunakan informasi dari pengukuran hasil belajar, baik melalui tes maupun non-tes (Dadang Asep Sruyadi et al., 2023). Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan kegiatan penting dalam berbagai konteks untuk menilai efektivitas, pencapaian tujuan serta memberikan umpan balik bagi perbaikan di masa yang akan datang.

2.1.2. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi mencakup berbagai aspek penting dalam penilaian dan perbaikan suatu kegiatan, program, atau proses. (William A. Mehrens dan Irlin J. Lehmann. 1978) menjelaskan bahwa evaluasi sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat alternatif keputusan.

Berikut adalah beberapa tujuan utama dari evaluasi yang perlu dipahami antara lain :

1. Menilai Penguasaan Kompetensi
2. Mengidentifikasi Kesulitan
3. Menilai Efektivitas dan Efisiensi
4. Memberikan Umpan Balik
5. Menentukan Keberhasilan Program
6. Membantu Perencanaan Masa Depan.

2.1.3. Jenis Evaluasi

Jenis evaluasi menurut Fintsterbusch dan Motz dalam Wibawa (1994:74-75) yaitu :

- a) *Single program after only*, merupakan jenis evaluasi yang melakukan pengukuran kondisi atau penilaian terhadap program setelah meneliti setiap variabel yang dijadikan kriteria program.
- b) *Single program before-after*, merupakan penyempurnaan dari jenis pertama yaitu adanya data tentang sasaran program pada waktu sebelum dan setelah program berlangsung.
- c) *Comparative after only*, merupakan penyempurnaan evaluasi kedua tapi tidak untuk yang pertama dan analisis hanya melihat sisi keadaan sasaran bukan sasarannya.
- d) *Comparative before-after*, merupakan kombinasi ketiga desain sehingga informasi yang diperoleh adalah efek program terhadap kelompok sasaran.

2.1.4. Dimensi Evaluasi Kebijakan

Dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhatikan dalam membicarakan evaluasi. Menurut Winarno (2002:171) setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam menimbangkan dampak dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi :

- a) Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat.
- b) Kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan
- c) Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang
- d) Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik
- e) Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

2.1.5. Kriteria Evaluasi Dampak Kebijakan

Mengevaluasi dampak suatu program atau kebijakan publik perlu diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur suatu keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi dampak kebijakan publik yaitu sebagai berikut :

a) Efektivitas

Menurut Winarno (2002: 184) Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

b) Efisiensi

Menurut Winarno (2002: 185) Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara

efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya kecil dinamakan efisien.

c) Kecukupan

Menurut Winarno (2002: 186) Kecukupan dalam kebijakan publik dapat atau bisa dikatakan tujuan yang telah tercapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas guna memuaskan suatu kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

d) Perataan

Menurut Winarno (2002: 187) Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial serta merujuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

e) Responsivitas

Menurut Winarno (2002: 189) Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

f) Ketepatan

Menurut Winarno (2002: 184) Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi seperti dengan cara menilai apakah hasil dari alternatif yang

direkomendasikan tersebut merupakan suatu pilihan tujuan yang layak.

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan Sirekap yang telah diberlakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut.

2.2 Definisi *E-Government*

E-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang mampu mendorong dan memfasilitasi hubungan yang saling mendukung, selaras dan adil antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi, telekomunikasi, dan web/internet (Menkominfo). Menurut Heeks dalam Achmad Djunaedi (2002), *E-Government* diartikan sebagai pemanfaatan ICT untuk mendukung pemerintahan yang baik (*good governance*). Lebih lanjut dijelaskan bahwa *E-Government* mencakup :

- 1) *E-Administration*. Untuk memperbaiki proses pemerintahan dengan menghemat biaya, mengelola kinerja, membangun koneksi strategis dalam pemerintah sendiri dan dengan menciptakan pemberdayaan.
- 2) *E-Citizen & E-Services*. Menghubungkan warga atau masyarakat dengan pemerintah melalui cara berbicara kepada masyarakat dan mendukung akuntabilitas, mendukung demokrasi, dan dengan meningkatkan layanan publik.
- 3) *E-Society*. Membangun interaksi di luar pemerintah dengan bekerja secara lebih baik terhadap pihak bisnis, mengembangkan masyarakat, membangun kerja sama dengan pemerintah, dan membangun masyarakat madani.

Menurut Richardus Eko Indarjit (2005:18) paling tidak ada 6 (enam) komponen penting yang harus diperhatikan dalam penerapan *E-Government*, yaitu :

- 1) *Content Development* Menyangkut pengembangan aplikasi (perangkat lunak), pemilihan standar teknis, penggunaan bahasa pemrograman, spesifikasi sistem basis data, kesepakatan user interface, dan lain sebagainya
- 2) *Competency Building* Menyangkut pengadaan SDM, pelatihan dan pengembangan kompetensi maupun keahlian seluruh jajaran SDM di berbagai lini pemerintahan
- 3) *Connectivity* Menyangkut ketersediaan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi di lokasi dimana *e-government* diterapkan
- 4) *Cyber Security* adalah pengelolaan ruang server atau ruang pengumpulan informasi
- 5) *Citizen Interface* adalah bentuk dari kerja sama yang nyata antara Pemerintah dan Masyarakat. Dimana terdapat berbagai *Multi Access Channel* sehingga masyarakat dapat melihat secara langsung kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori *Electronic Government (E-Government)* yang dikemukakan oleh Richardus Eko Indarjit (2005:18) yang menyatakan bahwa ada lima komponen penting yang harus diperhatikan dalam penerapan *E-Government*. Pertama *Content Development*, yaitu menyangkut pengembangan aplikasi Sirekap yang diterapkan oleh KPU Kota Bandar Lampung melalui pemilihan standar teknis, bahasa pemrograman dan lain sebagainya. Kedua, *Competency Building*, yaitu dalam penelitian ini berkenaan dengan bagaimana KPU Kota Bandar Lampung melakukan pengadaan SDM, dan pelatihan pengembangan kompetensi maupun keahlian bagi petugas penyelenggara pemilu untuk menjalankan aplikasi Sirekap. Ketiga, *Connectivity*, yaitu pada penelitian ini berkenaan dengan bagaimana ketersediaan infrastruktur pendukung seperti jaringan

komunikasi untuk menjalankan aplikasi Sirekap di setiap wilayah di Kota Bandar Lampung. Keempat, *Cyber Laws*, yaitu bagaimana KPU Kota Bandar Lampung menyediakan dan mengelola ruang server atau pengumpulan informasi dengan aplikasi Sirekap. Kelima, *Citizen Interfaces*, yaitu pada penelitian ini berkenaan dengan bagaimana kerja sama atau keterbukaan informasi yang dilakukan KPU Kota Bandar Lampung dan masyarakat sehingga masyarakat dapat melihat secara langsung informasi yang ditampilkan dalam sirekap secara transparan.

2.3 Definisi Aplikasi

Aplikasi dalam konteks teknologi informasi merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan cara yang efisien dan efektif. (Jogiyanto, 2004) menambahkan bahwa aplikasi berisi perintah-perintah yang digunakan untuk mengolah data, dan secara umum merupakan transformasi dari proses manual ke sistem komputer, sehingga data dapat diolah secara optimal. Definisi ini menunjukkan bahwa aplikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Dalam hal ini aplikasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti aplikasi *desktop*, aplikasi *web*, dan aplikasi *mobile*, masing-masing dengan karakteristik dan fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pengguna.

2.4 Definisi Informasi

Sistem informasi adalah sebuah entitas (kesatuan) formal yang terdiri dari berbagai sumber daya fisik maupun logika. Sistem informasi merupakan perpaduan antara manusia dan mesin yang dirancang secara terpadu untuk menyediakan informasi yang mendukung kegiatan operasional, fungsi manajerial, serta proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Definisi lain mengatakan bahwa sistem informasi adalah sekumpulan komponen-komponen yang saling

berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi terkait untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian (Prahasta, 2009).

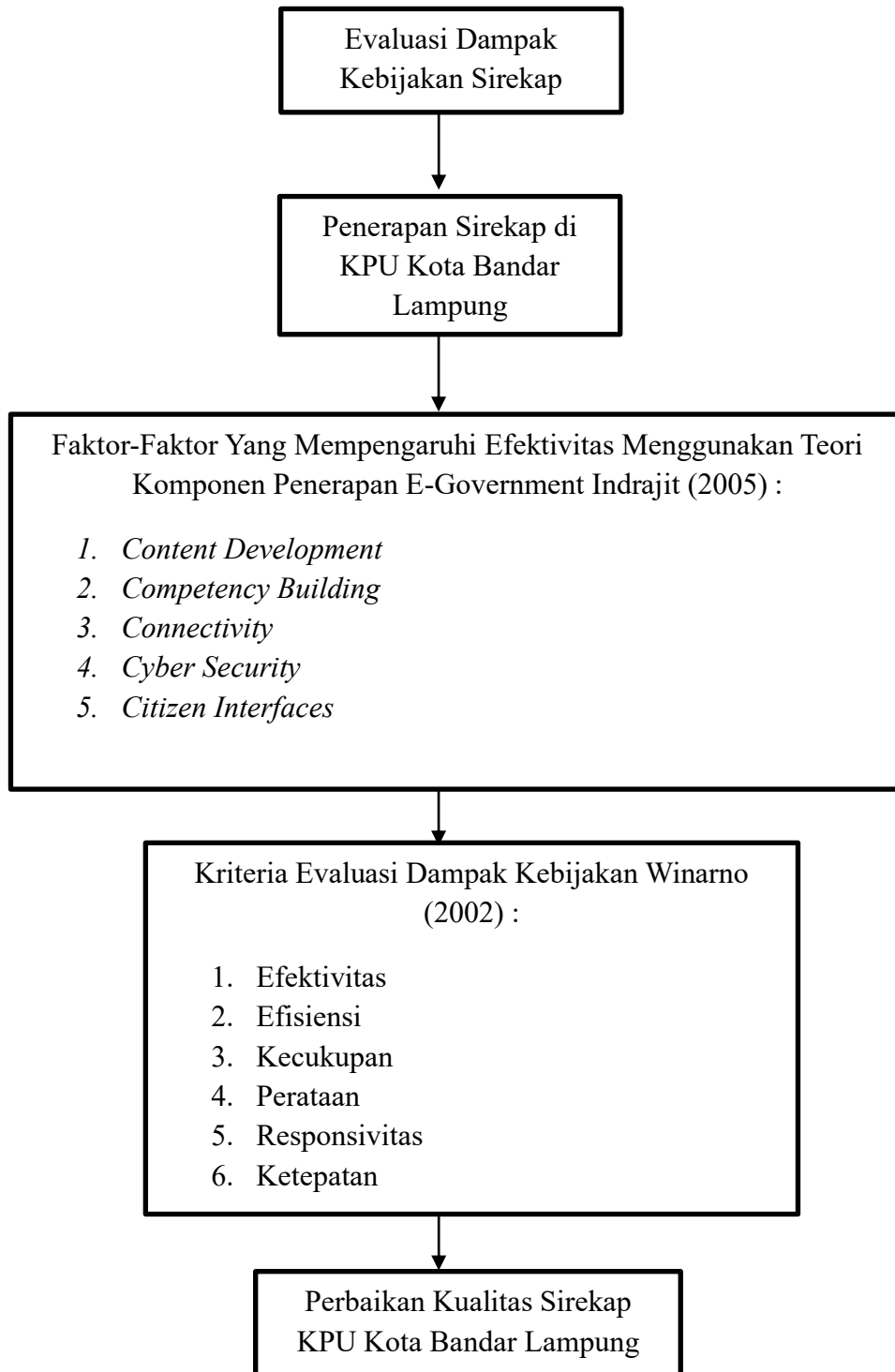
Kemampuan yang bisa dilakukan oleh sistem informasi sebagaimana yang dikatakan oleh Turban, Mclean dan Wetherbe (Kadir, 2003) yaitu :

1. Menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang mudah, akurat dan cepat
2. Menyimpan Informasi dalam jumlah yang sangat besar dalam ruang yang kecil tapi mudah diakses
3. Memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat banyak diseluruh dunia dengan cepat dan mudah
4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi orang-orang yang bekerja dalam kelompok pada suatu tempat atau beberapa lokasi
5. Menyajikan informasi dengan jelas yang menggugah pikiran manusia
6. Mengotomatiskan proses-proses bisnis yang semi-otomatis dan tugas-tugas yang dikerjakan secara manual
7. Mempercepat pengetikan dan penyuntingan
8. Pembiayaan yang lebih murah daripada mengerjakan secara manual

2.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah rangkaian pemikiran logistik yang disusun dalam bentuk diagram untuk menggambarkan secara umum pola substansi penelitian yang akan dilakukan. Kerangka ini disusun berdasarkan pertanyaan penelitian dan menggambarkan kumpulan konsep serta hubungan antar konsep atau variabel tersebut. (Sugiyono, 2015) menambahkan bahwasannya kerangka pikir ialah alur berpikir yang menggambarkan hubungan antara variabel yang diteliti berdasarkan teori dan fakta yang relevan. Ini membantu peneliti menjelaskan dasar hubungan kausal atau asosiasi antara variabel-variabel tersebut.

Adapun dalam penelitian ini, penulis akan meneliti mengenai “Evaluasi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2024” dan pada penelitian ini penulis menggunakan teori enam komponen penerapan *e-government* yang dikemukakan oleh Richardus Eko Indrajit (2005) dan menganalisis dampak kebijakan Sirekap KPU Kota Bandar Lampung menggunakan kriteria evaluasi dampak kebijakan menurut Winarno (2002). Berikut ini penulis sajikan gambaran kerangka pikir dalam penelitian ini :



Gambar 1 Kerangka Pikir
Sumber diolah oleh peneliti (2024)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Jenis Penelitian yang berjudul “Evaluasi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) oleh Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024” menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Denzin & Lincoln, 1994) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Burhan Bungin dalam (Ibrahim, 2015) juga mendefinisikan pendekatan kualitatif adalah proses kerja penelitian yang sasarannya terbatas, namun kedalaman datanya tidak terbatas, semakin dalam dan berkualitas data yang diperoleh atau dikumpulkan maka semakin berkualitas pula penelitiannya. Tipe penelitian kualitatif sangat cocok untuk penelitian ini karena memungkinkan peneliti menggali pengalaman, persepsi, dan tantangan yang dihadapi oleh pengguna Sirekap seperti petugas pemilu, saksi dan pemilih. Wawancara mendalam atau diskusi kelompok terfokus dapat mengungkap kendala teknis dan non-teknis yang sulit diukur dengan angka.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan dan juga tempat peneliti melakukan penelitian. Pemilihan lokasi sangat penting untuk menjamin validitas data yang diperoleh. (Sugiyono, 2018) menambahkan, lokasi penelitian dipilih berdasarkan kesesuaian dengan masalah yang diteliti. Pemilihan lokasi harus mempertimbangkan aksesibilitas, ketersediaan data, dan dukungan dari pihak terkait untuk mempermudah proses pengumpulan

data. Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti ialah KPU Kota Bandar Lampung. Alasan peneliti melakukan penelitian ditempat tersebut karena KPU Kota Bandar Lampung merupakan lembaga yang berwenang dalam menjalankan proses pemilu serta bertanggung jawab pada penerapan aplikasi Sirekap yang dirasa kurang maksimal pada pemilihan umum tahun 2024

3.3 Fokus Penelitian

Spradley mengemukakan bahwa fokus penelitian adalah domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Penelitian kualitatif, menentukan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (Sugiyono, 2016). Menentukan fokus penelitian berfungsi untuk mempersempit cakupan objek yang diteliti, sehingga peneliti dapat menghindari kebingungan yang disebabkan oleh banyaknya data yang terkumpul di lapangan. Fokus penelitian ini diarahkan pada informasi baru yang ingin diperoleh mengenai kondisi ekonomi dan sosial. Hal ini bertujuan untuk memperjelas batasan dalam studi kualitatif serta menyaring data, sehingga hanya data yang relevan yang dimanfaatkan dalam penelitian. Berikut indikator dalam fokus penelitian ini meliputi :

A. Efektivitas

1. Tingkat akurasi hasil rekapitulasi Sirekap dibandingkan dengan metode manual
2. Kemampuan sistem dalam mendeteksi dan mengoreksi kesalahan input

B. Efisiensi

1. Waktu yang dibutuhkan untuk proses rekapitulasi dibandingkan dengan metode manual

C. Kecukupan

1. Kelengkapan fitur dalam mendukung rekapitulasi suara yang transparan dan akurat

2. Kapasitas *server* dalam menangani jumlah data pemilu yang besar

D. Pemerataan

1. Ketersediaan jaringan internet dan infrastruktur teknologi untuk mendukung penggunaan Sirekap

E. Responsivitas

1. Kecepatan KPU dalam menangani masalah teknis dan *error* pada sistem

F. Ketepatan

1. Kesesuaian sistem dengan regulasi pemilu dan kebijakan digitalisasi pemilu
2. Keamanan sistem dalam mencegah kesalahan teknis atau manipulasi data

3.4 Informan Penelitian

Menurut Moleong (2006, 132) dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, “Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian”. Selain itu Andi (2010, 147) dalam buku Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif menjelaskan bahwa “Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Memilih informan dapat dilakukan peneliti apabila peneliti memahami terkait topik dari apa yang diteliti dan memahami kondisi masyarakat dilingkungan penelitian (Bungin, 2021). Informan berikut dipilih sesuai dengan kebutuhan dari fokus penelitian yang telah dibuat. Sehingga informan yang dipilih bersangkutan langsung dengan informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi koridor penelitian yang sudah dibuat pada fokus penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan. *Purposive sampling* dalam penelitian evaluasi Sirekap di Kota Bandar Lampung digunakan untuk memilih informan yang memiliki

pengalaman langsung dalam penggunaan sistem ini. Dengan teknik ini, penelitian akan mendapatkan data yang mendalam dan relevan sehingga hasil evaluasi lebih akurat dan bermanfaat. Informan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	Alasan Memilih Informan
1	Budi Harjo	Akademisi FISIP Unila	Akademisi FISIP Unila memiliki latar belakang ilmu politik, administrasi publik dan pemerintahan yang relevan dalam menilai kebijakan, termasuk evaluasi sistem digital dalam proses pemilu seperti Sirekap.
2	Ghani Aulia	Ketua PPK KPU Kota Bandar Lampung Kecamatan Way Halim	Anggota PPK KPU dapat memberikan pandangan dari sudut pandang penyelenggara pemilu yang bekerja langsung dengan Sirekap, termasuk mengetahui bagaimana sistem ini mempengaruhi efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas rekapitulasi suara.
3	Refa Iswandi	Admin Aplikasi Sirekap KPU Kota Bandar Lampung	Sebagai pihak yang mengelola aplikasi, operator pada aplikasi Sirekap dapat memberikan masukan mengenai aspek keamanan data, risiko kesalahan input, serta potensi manipulasi.

No	Nama Informan	Jabatan	Alasan Memilih Informan
4	Muhammad Muhyi	Komisioner Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Bandar Lampung	Komisioner dapat memberikan wawasan mengenai potensi kecurangan, manipulasi atau kelemahan dalam sistem atau aplikasi Sirekap yang dapat mempengaruhi transparansi dan integritas hasil pemilu.
5	H.M. Hazizi	Ketua DPW PAN Provinsi Lampung	Anggota partai politik tentunya dapat memberikan perbandingan antara penggunaan Sirekap dan metode manual dalam rekapitulasi suara. Hal ini membantu dalam mengevaluasi apakah Sirekap lebih efektif atau justru menambah masalah dalam proses pemilu.

Sumber diolah oleh peneliti

3.5 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif memuat data verbal yang berisikan pengolahan data dari penelitian terdahulu sebagai rujukan awal dan diperkuat dengan hasil observasi serta wawancara dari informan yang sudah ditentukan. Kemudian data kualitatif disajikan berdasarkan kebaharuan data di lapangan dan disajikan dengan kalimat-kalimat non-numerik atau tanpa angka (Muhadjir, 1998). (Hadi, 2015) mengungkapkan bahwa jenis data

kualitatif adalah data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung. Berikut adalah data kualitatif yang diperoleh dari penelitian ini meliputi:

1. Penerapan aplikasi Sirekap yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung pada masa pemilu 2024 yang dirasa belum maksimal dan banyak mengalami berbagai kendala dan masalah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya laporan dan berita yang membahas masalah-masalah terkait rekapitulasi suara di Kota Bandar Lampung
2. Evaluasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung tentang penggunaan Sirekap pasca pemilu 2024 yang di fokuskan pada perbaikan, pengembangan aplikasi, serta melakukan bimtek bagi para petugas penyelenggara yang menggunakan aplikasi Sirekap.

3.6 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian yang diperoleh melalui dua sumber data (Sugiyono, 2016). Data dalam penelitian ini berasal dari pihak atau tempat tertentu yang menjadi sumber pengumpulan informasi. Apabila peneliti menggunakan metode kuesioner atau wawancara, maka sumber data ini disebut responden, yaitu individu yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti, baik secara tertulis maupun lisan.

Data primer dan sekunder merupakan sumber informasi yang menjadi dasar dalam kesimpulan menarik pada suatu penelitian. Walaupun keduanya memiliki peran yang sama sebagai sumber data, proses perolehannya berbeda. Oleh karena itu, metode pengumpulan data juga harus disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan, apakah dengan menggunakan seperti data primer atau data sekunder. (Arikunto, 2013) menambahkan sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah

subjek darimana data dapat diperoleh. Berikut merupakan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, antara lain :

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2017:193) yang dimaksud data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya, sumber data penelitian diperoleh langsung dari sumber utamanya, seperti wawancara, survei terhadap individu atau kelompok, maupun melalui observasi terhadap objek, peristiwa, atau benda tertentu. Dengan demikian, pengumpulan data dilakukan melalui metode penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian atau melalui observasi langsung.

Data primer Merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan informan terkait masalah penelitian. Wawancara tersebut dilakukan dengan mengikuti panduan yang telah disiapkan. Untuk menentukan informan, penelitian ini menerapkan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan penelitian.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2017:193) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data dalam penelitian diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung, seperti catatan buku, dokumen yang sudah ada, atau arsip, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Oleh karena itu, peneliti perlu mengumpulkan data dengan cara mencari atau menemukan arsip yang relevan dengan topik yang diteliti.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data kualitatif biasanya menggunakan tradisi pengamatan dan juga wawancara yang mendalam (*In-depth Interview*), observasi partisipatif (*Participant Observer*) (Bungin, 2021). Kemudian diperkuat dengan pendapat (Saputra, 2014) bahwa selain dengan menggunakan metode seperti wawancara dan dokumentasi diperlukan juga metode dokumentasi.

1. Wawancara Mendalam (*Depth Interview*)

Wawancara merupakan suatu bentuk percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu antara dua pihak, yaitu "pewawancara" (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan "yang diwawancarai" (*interview*) yang memberikan jawaban. Dalam wawancara, jenis pertanyaan dapat mencakup pengalaman, perilaku, serta perasaan, termasuk pertanyaan yang berkaitan dengan tindakan yang telah dilakukan seseorang dan pertanyaan yang bertujuan untuk memahami respons emosional individu. Wawancara mendalam memiliki makna yang serupa dengan *interview*, tetapi keunggulannya terletak pada kemampuan untuk menggali lebih dalam pengalaman orang lain dan makna di balik pengalaman tersebut, bukan sekadar menjawab pertanyaan. Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana permasalahan yang dialami oleh pengguna Sirekap dan apa saja evaluasi yang telah dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, foto-foto dan data yang relevan bagi mendukung sebuah penelitian. Dengan adanya metode dokumentasi, peneliti juga dapat menemukan bahwa sudah banyak atau sedikitnya penelitian sebelumnya (Bungin, 2021). Penelitian ini tidak hanya mengandalkan dokumen yang berkaitan dengan foto sebagai bukti bahwa penelitian

telah dilakukan. Dokumentasi juga mencakup penggunaan penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan atau referensi, yang kemudian dicantumkan dalam daftar pustaka. Peneliti juga menggunakan dokumen resmi Perundang-Undangan, PKPU, serta Keputusan Mahkamah Konstitusi.

3.8 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan cara atau proses yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan menjadi subjek penelitian. Secara lebih spesifik, metode ini memerlukan tahapan-tahapan yang sistematis dan terorganisir agar menghasilkan data yang akurat dan sesuai dengan kenyataan. Selain itu, teknik pengolahan data seringkali digunakan oleh para peneliti untuk mengolah data abstrak yang tidak memiliki bentuk fisik, namun dapat diamati melalui aplikasinya. Langkah-langkah yang harus dijalankan dalam pengolahan data antara lain :

1. Editing Data

Pengeditan data kegiatan dalam penelitian dilakukan dengan cara meninjau kembali informasi yang telah diperoleh untuk memastikan validitasnya dan mempersiapkannya untuk proses selanjutnya. Dalam tahap ini, peneliti mengolah data dari dokumentasi dan hasil wawancara, dengan menyesuaikan pada pertanyaan yang terdapat dalam pedoman wawancara, serta memilih dan menentukan data yang diperlukan untuk penulisan. Peneliti harus melakukan seleksi terhadap data yang diperoleh dari wawancara, mengorganisir data yang relevan dengan penelitian, dan menghubungkannya dengan data lainnya agar tercipta keterkaitan yang jelas. Proses ini juga memerlukan peneliti untuk menyusun kata-kata dalam bahasa yang baik, sesuai dengan kaidah, dan mudah dipahami. Kata-kata dari wawancara yang tidak sesuai dengan kaidah akan diperbaiki, sementara informasi yang tidak relevan dengan konteks penelitian akan dipisahkan dan dihilangkan.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data pada penelitian ini yaitu melakukan pembahasan atau hasil dengan kata lain berarti menjelaskan dan menemukan makna hasil dengan tujuan teoritis dan praktis penelitian (Silalahi, 2012). Tahapan ini dilakukan setelah proses pengeditan data. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali makna dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Pada tahap interpretasi data, tidak hanya dilakukan penjelasan dan analisis, tetapi juga dihasilkan kesimpulan dari proses tersebut. Peneliti berusaha menganalisis data yang diperoleh dari penelitian dan menyampaikannya dalam bahasa yang lebih mudah dipahami dalam bentuk kesimpulan.

3.9 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan prosedur reduksi data, *display* (Penyajian data), dan menarik kesimpulan (verifikasi). Proses tersebut dijabarkan menurut (Miles, B. Mathew, & Huberman, 1992) yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Peneliti dalam reduksi data ini melakukan pemilihan dan membuang data yang dianggap tidak perlu dari hasil editing yang telah di deskripsikan dalam proses interpretasi untuk memudahkan pemahaman atas data yang telah terkumpul dari hasil berbagai macam catatan lapangan dengan cara merangkum dan mengklarifikasikan sesuai masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti.

2. Penyajian Data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data-data yang ada dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang sudah dikumpulkan dan dipilih, disederhanakan, dan ditransformasikan untuk memusatkan perhatian disajikan dan disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan tertulis di lapangan.

3. Verifikasi Data

Verifikasi merupakan tahapan terakhir dalam menganalisis data. Data diuji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektivitas. Data yang sudah melalui tahap di uji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap mencari arti, makna dan menjelaskan apa yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian. Kegiatan peneliti dalam verifikasi data adalah melakukan penggunaan penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses *display* data.

Peneliti melakukan evaluasi terhadap data yang diperoleh dan menganalisisnya dengan menggunakan perspektif efektivitas untuk menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian ini. Selanjutnya, peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan hasil data yang telah direduksi dan disajikan. Proses pengolahan data dimulai dengan pencatatan data lapangan, yang merupakan data mentah, kemudian ditulis ulang dalam bentuk dan kategori tertentu. Setelah itu, data mengalami proses reduksi dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Data kemudian akan dianalisis, diperiksa keabsahannya, dan akhirnya disimpulkan.

3.10 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data tidak hanya digunakan untuk menyangkal hal yang dituduhkan terhadap konsep penelitian kualitatif yang menyatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, akan tetapi teknik pemeriksaan keabsahan data tersebut merupakan tahapan yang tidak lepas dari tubuh pengetahuan dalam penelitian kualitatif (Mekarisce, 2020). Menguji keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multi metode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data.

Konsep dasar dari pendekatan ini adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan lebih baik dan menghasilkan kebenaran yang lebih tinggi jika dianalisis dari berbagai perspektif. Mengamati fenomena yang sama dari sudut pandang yang berbeda memungkinkan peneliti untuk mencapai tingkat kebenaran yang lebih akurat. Oleh karena itu, triangulasi merupakan upaya untuk memverifikasi kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dengan menggunakan berbagai sudut pandang, sambil meminimalkan bias yang mungkin muncul selama proses pengumpulan dan analisis data.

Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap perumusan masalah dan tujuan penelitian, kesimpulan utama yang dapat ditarik adalah bahwa penerapan Sirekap oleh KPU Kota Bandar Lampung pada Pemilu 2024 secara umum telah membawa kontribusi penting dalam mempercepat proses rekapitulasi suara dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemilu. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi sejumlah hambatan teknis dan non-teknis yang berimplikasi pada kualitas implementasi di lapangan.

Dari sisi tujuan penelitian, penerapan Sirekap memang terbukti mampu memberikan manfaat dalam memperkuat akuntabilitas publik serta mempermudah akses informasi bagi masyarakat. Akan tetapi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur, keterampilan petugas, serta dukungan regulasi belum sepenuhnya optimal sehingga menimbulkan kendala dalam pelaksanaan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara harapan normatif dari kebijakan digitalisasi rekapitulasi suara dengan realitas implementatif di lapangan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan penerapan Sirekap perlu dipahami sebagai langkah maju dalam modernisasi pemilu di Indonesia, namun pada saat yang sama menuntut penguatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan teknologi yang memadai, serta mekanisme evaluasi berkelanjutan agar tujuan awal kebijakan dapat tercapai secara maksimal. Kesimpulan ini sekaligus menegaskan kontribusi penelitian dalam memberikan gambaran empiris

mengenai efektivitas kebijakan digital pemilu serta rekomendasi konkret bagi penyelenggara untuk perbaikan di masa mendatang.

5.2 Saran atau Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai evaluasi penerapan aplikasi Sirekap oleh KPU Kota Bandar Lampung 2024, maka saran dan rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. KPU perlu melakukan penguatan kompetensi teknis penyelenggara atau bimtek dengan cara menyeluruh. Artinya KPU harus melakukan pelatihan kepada seluruh petugas KPPS, bukan hanya pada 1 atau 2 orang saja. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir apabila terjadi *error* atau kesalahan pada sistem, semua anggota KPPS bisa menangani hal tersebut agar proses rekapitulasi tidak terhambat dalam waktu yang lama.
2. Penguatan infrastruktur digital menjadi syarat mutlak. Daerah lain sebaiknya memastikan tersedianya jaringan internet yang bagus dan stabil, perangkat gawai yang memadai, serta sistem cadangan untuk mengantisipasi kendala teknis di lapangan. Pengalaman Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa lemahnya konektivitas dapat memperlambat proses unggah data dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur harus menjadi prioritas sejak tahap perencanaan.
3. Kolaborasi multipihak menjadi *best practice* terakhir yang dapat ditiru. KPU daerah lain perlu memperkuat koordinasi dengan Bawaslu, partai politik, pemantau pemilu, serta masyarakat sipil sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan. Pendekatan kolaboratif ini terbukti mampu menekan resistensi maupun kecurigaan publik terhadap Sirekap, sekaligus menjamin adanya mekanisme pengawasan yang lebih partisipatif. Dengan demikian, pengalaman Kota Bandar Lampung dapat menjadi pembelajaran kolektif agar penerapan Sirekap di daerah lain berlangsung lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, J. N. 2024. Audit Sistem Informasi Aplikasi Sirekap KPU: Analisis Keamanan dan Efisiensi. *Switch: Jurnal Sains dan Teknologi Informasi*, 23-32.
- Amrynudin, A. D. 2024. Data Anomali Dalam Sistem Informasi Rekapitulasi Pada Pemilu 2024. *Info Singkat*.
- Andi. 2010. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Azzahra, A. N. 2024. "Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi yang Jurdil dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah.". *Unes Law Review* 6.4 , 11818-11832.
- Azzahri, R. 2024. Tinjauan Kritis terhadap Penggunaan Aplikasi Sirekap dalam Proses Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024. *Prosiding: Resiliensi Indonesia dalam Pusaran Disrupsi Global*, 398-405.
- Bungin, B. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Jakarta: Kencana.
- Denzin, N. K. 1994. *andbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks. CA: Sage Publications.
- Ericson, E. H. 1968. *Identity: Youth and Crisis*. New York: W. W. Norton & Company.
- Gauru, C. C. 2022. Implementasi Sirekap Dalam Pilkada 2020 Kabupaten Semarang. Reformasi *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 224-230.
- Jogiyanto, H. M. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. Yogyakarta: Yogyakarta: BPFE.
- Kadir, A. 2003. *Pengenalan Sistem Informasi*. Andi Offset. Yogyakarta.

- Kartika, M. 2020. KPU Ganti Situng dengan Sirekap.
- Kirk, J. 1986. *Reliability and Validity in Qualitative Research*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Kusumadinata, A. A. 2024. Sosialisasi Sirekap Sebagai Alat Bantu Pemilu Nasional Tahun 2024. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia* 3.2 , 138-146.
- Lestari, A. Y. 2024. Audit Sistem Informasi Aplikasi Sirekap KPU: Analisis Keamanan dan Efisiensi. *Switch: Jurnal Sains dan Teknologi Informasi*, 23-24.
- Lingga, I. Z. 2024. Penggunaan Teknologi Informasi Pada Proses Rekapitulasi dalam Perspektif Pemilu Transparan di Kabupaten Asahan. *PERSPEKTIF*, 116-1175.
- Mega, N. A. 2024. Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Demokrasi Substantif Pada Pemilihan Umum: Studi Kasus Manipulasi Data Dalam Sirekap Pada Pilpres 2024. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 278-304.
- Mehrens, W. A. 1978. *Measurement and Evaluation in Education and Psychology*. New York: 2nd Ed. Holt, Rinehart and Winston.
- Moleong, L. J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Muhadjir, N. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Yogyakarta
- Nurhamiden, M. 2024. Sirekap: Tantangan dan Potensi Kekeliruan Proses Rekapitulasi Pemilu Serentak di Indonesia. *SOSIOLOGI: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 101-110.
- Pradesa, A. I. 2024. Analisis Penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (SIREKAP) Dalam Menghadapi Problematika Pemilu 2024. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*.
- Prahasta, E. 2009. *Sistem Informasi Geografis: Konsep-Konsep Dasar (Perspektif Geodesi & Geomatika)*. Informatika Bandung. Bandung
- Randi, F. 2022. "Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi Menggunakan Metode Pieces Framework.". *Jurnal Litbang Kota Pekalongan* 20.1.
- Santoso, T. 2019. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Saetrian, I. S. 2024. Analisis Yuridis Tentang Sengketa Pemilu Terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Yang

Terindikasi ‘Defect’ Pada Pemilu Tahun 2024 Yang Berpotensi Merugikan Bakal Calon Presiden. *Demokrasi : Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 224-240.

Spradley, J. P. 2016. *The Ethnographic Interview*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Sucahyo, N. 2020. *Mencari Penyebab Meninggalnya Petugas Pemilu*. VOA. Daerah Istimewa Yogyakarta

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Utama, F. 2020. Manfaat Sirekap di Pilkada Serentak 2020.

Yandra, A. S. 2023. Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih oleh KPU Provinsi Riau Jelang Pemilu 2024. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 164-179.